

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dalam 8 (delapan) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab III membahas tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab IV membahas Tujuan dan Sasaran, Bab V membahas Strategi dan Arah Kebijakan, Bab VI membahas Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan, Bab VII membahas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Bab VIII Penutup.

Renstra ini telah mengalami pentahapan mulai dari persiapan renstra, tahapan penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Demikian, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Aamiin ya Robbal'alamiin.

Pekalongan, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas dan Fungsi	12
2.1.2 Struktur Organisasi	24
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.2.1 Sumber Daya Manusia	25
2.2.2 Sarana Dan Prasarana	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.4.1 Tantangan	56
2.4.2 Peluang	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	58
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	64
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA	64
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi	69
3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan	72

	Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	
3.3.4	Telaahan Renstra Dinpermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah	74
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	77
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	77
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	77
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	77
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	78
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	119
BAB VIII	PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	25
2.	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	25
3.	Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume di DPMPPA Tahun 2020 (Gedung dan Kendaraan Bermotor)	26
4.	Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume di DPMPPA Tahun 2020.....	26
5.	Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan.....	30
6.	Tabel 2.6	Lembaga Kemasyarakatan Kota Pekalongan.....	48
7.	Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan.....	49
8.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	58
9.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihasilkan.....	63
10.	Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
11.	Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	71
12.	Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra DP3AP2KB Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	73
13.	Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dispermadesdukcapil Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	76
14.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan	79
15.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	81
16.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif	

	DPMPPA Kota Pekalongan.....	87
17. Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	120

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra.....	2
2.	Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
3.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan.....	24
4.	Gambar 2.2	Jumlah Kasus di LP-PAR Kota Pekalongan.....	45
5.	Gambar 2.3	Grafik Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	46
6.	Gambar 2.4	Grafik Perbandingan IDG Kota Pekalongan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

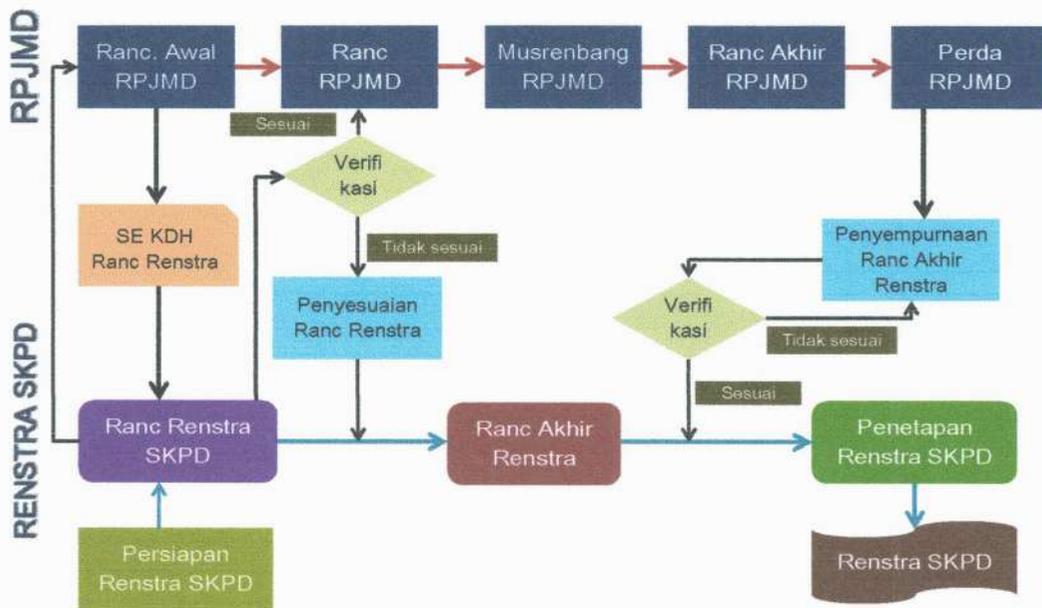
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda No. 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan renstra, tahapan penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



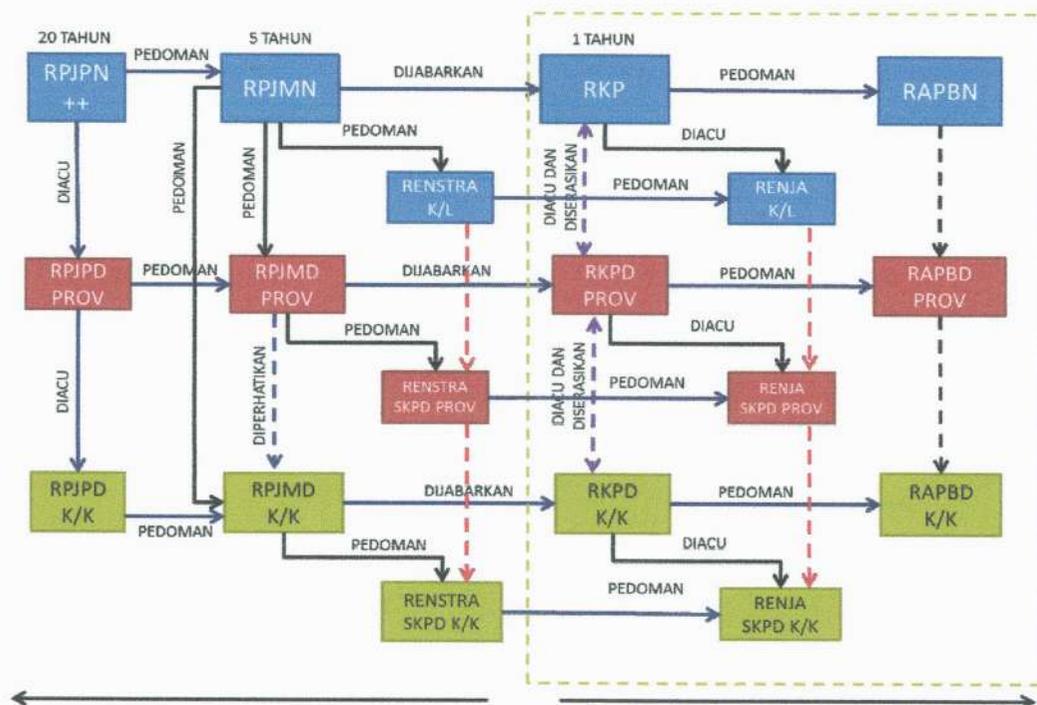
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen dalam Tahapan Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai salah satu dokumen perencanaan juga disinkronkan dengan perencanaan pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar, juga merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional, juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dalam satu kerangka yang integratif, holistik, bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat digambarkan dalam gambar 1.2 berikut :



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1.2.1 Landasan Idiil

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945

1.2.3 Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang

- Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun

- 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;

- f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (ANJAB), analisis beban kerja (ABK) dan evaluasi jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

1.1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan mengkoordinasikan laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi standar

operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;

l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- f. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang

kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. perumusan bahan bimbingan dan kerjasama di bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan teknis fasilitasi bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pengoordinasian kegiatan gotong royong masyarakat;
- f. penyelenggaraan pengembangan kegiatan pengelolaan dan penyusunan data kelurahan di bidang pembangunan, potensi, lembaga masyarakat, institusi dan peran serta masyarakat;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi program-program bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi program kerja dan kegiatan urusan kerjasama/bantuan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat provinsi dan pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan serta lomba kelurahan;
- j. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Kelembagaan Masyarakat

Seksi Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kelembagaan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat;
- c. menyusun bahan bimbingan dan kerjasama pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. menyusun bahan kebijakan fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pengembangan kegiatan pengelolaan dan menyusun data kelurahan di bidang pembangunan, potensi, lembaga masyarakat, institusi dan peran serta masyarakat;
- f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. menyusun bahan bimbingan dan kerjasama pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan data pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- f. melaksanakan verifikasi dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya data base pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan data profil kelurahan;
- h. menyusun data potensi ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna ;
- i. melaksanakan pengembangan kegiatan gotong royong masyarakat;
- j. melaksanakan pengembangan kegiatan kelompok ekonomi produktif pra koperasi;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan

- perempuan dan anak;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. perumusan kajian kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - h. perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - i. penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - j. penyelenggaraan standarisasi lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;

- k. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- l. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- m. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. mengelola data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;

- d. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- e. menyusun bahan kajian kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- h. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- j. menyusun bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3.2 Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pemenuhan hak

- anak;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
- c. mengelola data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- d. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- e. menyusun bahan kajian kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- h. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- i. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. menyusun bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- l. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3.3 Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas

:

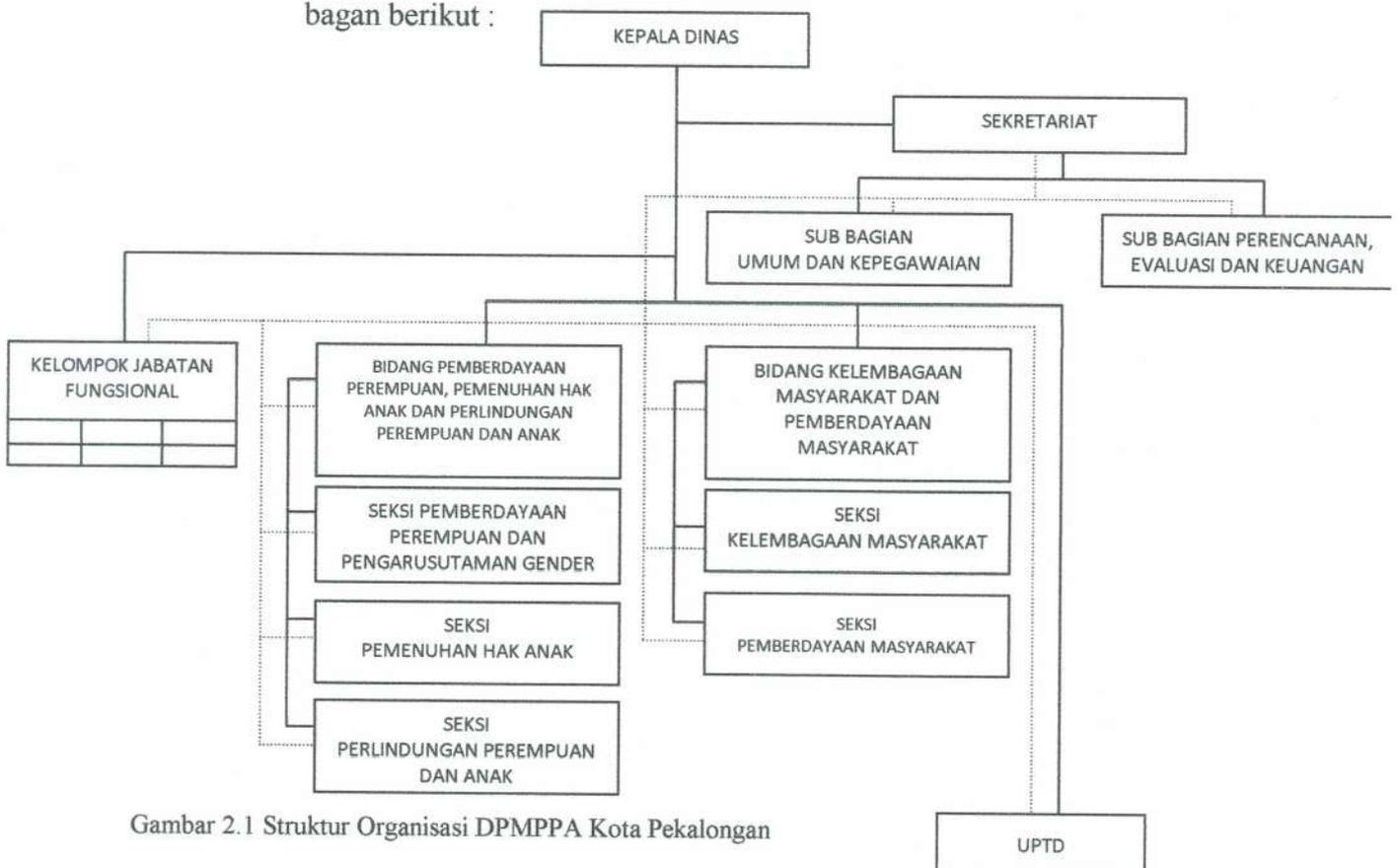
- a. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. mengelola data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- e. menyusun bahan perumusan kajian kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- h. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- j. menyusun bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan

- perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, nampak pada bagan berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 17 (Tujuh belas) orang.

Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	2	3	5
4	D3	-	1	1
5	S1	2	6	8
6	S2	-	2	2
	Jumlah	4	12	16

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Jenjang Kepangkatan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	2	8	10
4	Golongan IV	1	1	2
	Jumlah	5	11	16

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Kota Pekalongan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume di DPMPPA Tahun 2020 (Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No.	Jenis Aset	Volume
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1000 m2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	504 m2
3	Station Wagon (Kendaraan Bermotor Roda 4)	3 unit
4	Sepeda Motor (Kendaraan Bermotor Roda 2)	17 unit

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPMPPA Tahun 2020

No.	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Stationary Water Pump	√		1 unit
2	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	√		1 unit
3	Lemari Besi/Metal	√		9 buah
			√	1 buah
4	Lemari Kayu	√		14 buah
			√	1 buah
5	Rak Kayu		√	7 buah
6	Filing Cabinet Besi	√		4 buah
			√	5 buah
7	Filing Cabinet Kayu		√	3 buah
			√	1 buah
8	Brandkas	√		1 buah
			√	1 buah
9	Lemari Sorok	√		2 buah
			√	1 buah
10	Lemari Kaca	√		2 buah
11	Papan Visual/Papan Nama	√		1 buah
12	Peta		√	1 buah
13	Alat Penghancur Kertas		√	1 buah
14	Mesin Absensi	√		2 buah
15	Papan Nama Instansi	√		6 buah
16	Papan Pengumuman	√		2 buah
17	Papan Pengumuman		√	2 buah
18	Meja Kerja Kayu	√		4 buah
19	Kursi Besi/Metal	√		2 buah
20	Meja Rapat	√		1 buah
21	Tempat Tidur Besi	√		2 buah

No.	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
22	Meja Telepon		√	1 buah
23	Meja Podium		√	2 buah
24	Meja Resepsionis	√		1 buah
25	Meja Tambahan	√		2 buah
26	Meja Makan Besi	√		1 buah
27	Kursi Fiber Glas/Plastik	√		11 buah
28	Kursi Rapat	√		60 buah
29	Kursi Tamu	√		4 set
30	Kursi Putar	√		5 buah
31	Kursi Biasa		√	61 buah
32	Kursi Lipat		√	3 buah
33	Meja Komputer		√	1 buah
34	Meja Komputer	√		1 buah
35	Tikar	√		1 buah
36	Jam Elektronik	√		4 buah
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	√		1 buah
38	Mesin Pemotong Rumput	√		1 buah
39	Lemari Es	√		2 buah
40	A.C. Window	√		10 unit
41	Kipas Angin	√		1 buah
42	Kompas Gas (Alat Dapur)	√		5 buah
43	Tabung Gas	√		2 buah
44	Treng Air/Tandon Air	√		4 buah
45	Alat Dapur Lainnya	√		38 buah
46	Televisi	√		1 buah
			√	1 buah
47	Video Cassette		√	2 buah
48	Sound System	√		1 buah
49	Karaoke		√	1 buah
50	Megaphone	√		2 buah
51	Microphone	√		4 buah
52	Microphone Table Stand		√	1 buah
53	Tustel	√		2 buah
			√	2 buah
54	Gambar Presiden/Wakil Presiden		√	1 buah
55	Tiang Bendera	√		2 buah
56	Tangga Aluminium	√		2 buah
57	Kaca Hias		√	2 buah
58	Dispenser	√		3 buah
59	Mimbar/Podium	√		1 buah
60	Handy Cam	√		2 buah

No.	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
			√	1 buah
61	Gordyin/Kray	√		12 buah
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain	√		2 buah
63	Meja Kerja Pejabat Eselon II	√		1 buah
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√		2 buah
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	√		21 buah
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	√		2 buah
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√		1 buah
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√		12 buah
69	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	√		20 buah
70	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	√		2 buah
71	Intercom Unit	√		1 buah
72	Proyektor + Attachment		√	1 buah
73	Camera Electronic		√	1 buah
74	Lensa Kamera		√	1 buah
75	Telephone (PABX)	√		1 buah
76	Pesawat Telephone		√	1 buah
77	Facsimile	√		2 buah
78	Publik Address (Lapangan)		√	11 buah
79	Treat Mill		√	1 buah
80	Alas Jungkitan		√	1 buah
81	Rupa-rupa Alat Peraga	√		4 buah
82	P.C Unit	√		14 unit
83	Lap Top	√		10 unit
			√	4 unit
83	Note Book	√		6 unit
			√	1 unit
84	Hard Disk		√	1 buah
85	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		√	1 unit
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√		28 unit
			√	10 unit
87	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	√		1 unit
88	Modem	√		1 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan telah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Persentase kampung layak anak	%	-	25,00	50,00	-	25,00	50,00	50,00	100,00	belum tercapai
2	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	%	-	51,61	77,42	-	96,77	90,32	90,32	100,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda	Orang		349,00			349,00		349,00	349,00	tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menuju Kota Layak Anak	Orang				186,00		186,00	186,00	286,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah dokumen Perwal Perlindungan Anak yang disusun	Dokumen				1,00		1,00	1,00	1,00	tercapai
	- Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SMP, dan SMA	Sekolah				9,00		9,00	9,00	21,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	Anak		250,00		167,00	250,00	167,00	417,00	492,00	akan tercapai
	- Jumlah Forum Anak yang terpilih mendapat penghargaan lomba Forum Anak	Kelompok				4,00		4,00	4,00	4,00	tercapai
3	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR	Bulan		12,00			12,00		12,00	12,00	tercapai
	- Jumlah pendampingan kasus yang dilaksanakan	kali				40,00		46,00	46,00	86,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Kelompok Mitra P2MBG	Orang		50,00			50,00		50,00	50,00	tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	Orang		45,00		90,00	45,00	90,00	135,00	225,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP	Orang		100,00			100,00		100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah kelompok posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba posyandu	Kelompok				4,00		4,00	4,00	8,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah kegiatan Gender Champion yang dilaksanakan	kali				1,00		1,00	1,00	1,00	tercapai
	- Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi	TP PKK		32,00			32,00		32,00	32,00	tercapai
	- Jumlah TP PKK Kelurahan yang dibina	TP PKK Kelurahan				8,00		8,00	8,00	16,00	akan tercapai
	- Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK	TP PKK Kelurahan				3,00		3,00	3,00	6,00	akan tercapai
	- Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba produk unggulan one village one produk innovation	TP PKK Kelurahan				3,00		3,00	3,00	6,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK	Kelompok				3,00		3,00	3,00	6,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan orientasi pengelolaan sampah dan pelatihan pembuatan tas dan limbah plastik	Orang				112,00		112,00	112,00	112,00	tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan hatinya PKK	Orang				35,00		35,00	35,00	35,00	tercapai
	- Jumlah kelompok Bank Sampah yang dibentuk	Kelompok				4,00		4,00	4,00	8,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita	Bulan		12,00			12,00		12,00	12,00	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah fasilitasi peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan	kali				1,00		1,00	1,00	1,00	tercapai
	- Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	orang/kali				40,00		40,00	40,00	60,00	akan tercapai
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan		11,00		11,00	11,00	11,00	22,00	34,00	akan tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Orang/ Kali		284,00		143,00	284,00	226,00	510,00	667,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit		2,00		1,00	2,00	1,00	3,00	5,00	akan tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit		20,00		18,00	20,00	18,00	38,00	56,00	akan tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit		14,00		10,00	14,00	10,00	24,00	28,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	-	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	Dokumen		6,00		6,00	6,00	6,00	12,00	18,00	akan tercapai
	- Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Dokumen		6,00		6,00	6,00	6,00	12,00	18,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	Dokumen		1,00			1,00		1,00	1,00	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Bulan		12,00		12,00	12,00	12,00	24,00	36,00	akan tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen				5,00		5,00	5,00	10,00	akan tercapai
4	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak perangkat daerah berdasarkan SK Walikota	Orang/ Kali		1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik	Kali		3,00			3,00		3,00	3,00	tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa											
1	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM	Bulan		12,00			12,00		12,00	12,00	tercapai
	- Jumlah monev PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas	Orang/kali				270,00		270,00	270,00	270,00	tercapai
	- Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PPKSBM di Kota Pkl	Kecamatan		4,00			4,00		4,00	4,00	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah money pembangunan berbasis masyarakat	Orang/kali				135,00		135,00	135,00	189,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator	Orang				36,00		36,00	36,00	64,00	akan tercapai
	- Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD	Kelurahan		3,00		3,00	3,00	3,00	6,00	9,00	akan tercapai
2	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	%	-	33,33	66,67	-	33,33	66,67	66,67	100,00	belum tercapai
	- Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	Kelurahan		3,00			3,00		3,00	6,00	akan tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK	Orang		702,00		702,00	702,00	702,00	1.404,00	2.106,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Peningkatan Kapasitas LKK	LKK		1,00			1,00		1,00	1,00	tercapai
	- Jumlah monev LKK	orang/kali				54,00		54,00	54,00	54,00	tercapai
3	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan	LKK		32,00			32,00		32,00	32,00	tercapai
	- Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan	Lokasi		94,00			94,00		94,00	94,00	tercapai
	- Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	Kelurahan		3,00			3,00		3,00	6,00	akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat tingkat Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen				1,00		1,00	1,00	1,00	tercapai
	- Jumlah inovator TTG	Inovator		3,00			3,00		3,00	6,00	akan tercapai

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

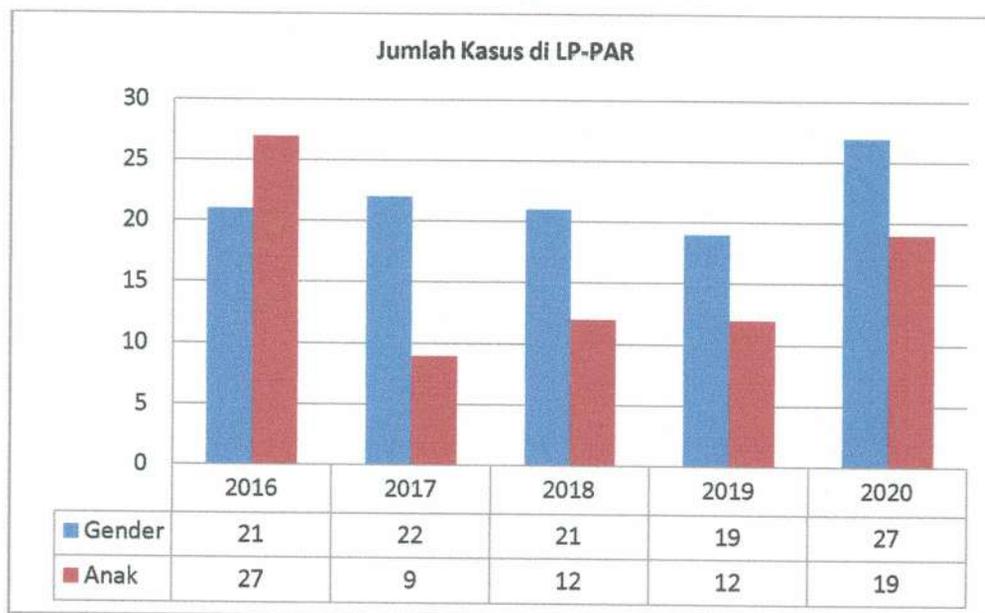
1. Kota Layak Anak (KLA)

Sejak tahun 2019, Kota Pekalongan dalam mewujudkan Kota Layak Anak telah diapresiasi oleh Kementerian PPPA RI dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Madya, yang sebelumnya di tahun 2018 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama.

Dalam Perubahan Ketiga Renstra Tahun 2016 – 2021, untuk mendukung capaian Kota Layak Anak telah ditetapkan indikator persentase kampung layak anak dan cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Kampung Layak Anak atau Kelurahan Layak Anak ditargetkan 4 (empat) kelurahan, sampai dengan tahun 2020 telah tercapai 2 (dua) kelurahan atau 50%, tahun 2021 akan tercapai 100%.

Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak telah tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait, stakeholder, maupun LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2020, diolah
Gambar 2.2: Jumlah Kasus di LP-PAR

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender, dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, Focal Point di tiap Perangkat Daerah, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Tim Teknis ARG. PPRG dengan *indikator persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender* disusun tiap tahun oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Capaian IPG Kota Pekalongan menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian provinsi maupun nasional.

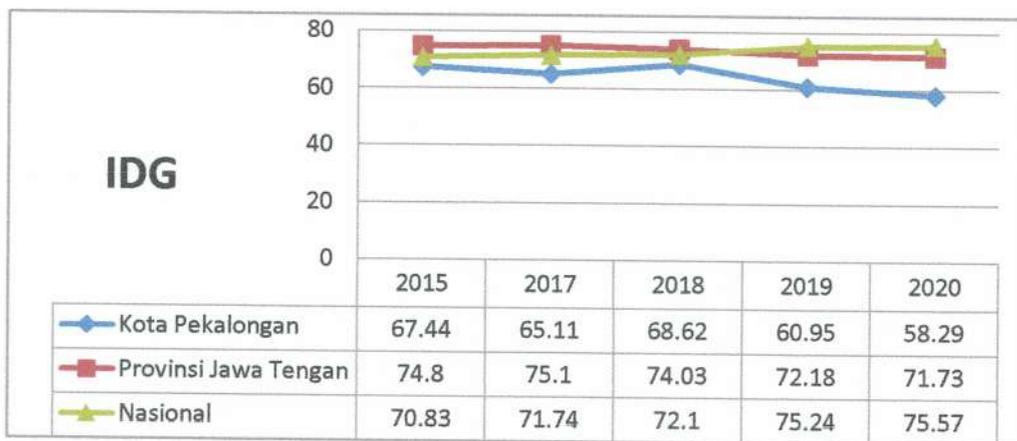


Gambar 2.3 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Pekalongan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional

Sumber : BPS, 2021

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Nilai IDG semakin ideal jika mendekati angka 100.

Perkembangan IDG Kota Pekalongan cenderung menurun disebabkan nilai dominan keterlibatan perempuan dalam parlemen menurun. Hal tersebut perlu upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, sinergitas dengan lintas sektor dan mendapat dukungan masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan maupun dunia usaha. Capaian IDG Kota Pekalongan tahun 2015- 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.4 Grafik Persandingan capaian IDG Kota Pekalongan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional

Sumber : BPS, 2021

Komponen pembentuk IDG Kota Pekalongan tahun 2020 :

- Sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,50 persen;
- Perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 52,64 persen;
- Keterlibatan perempuan dalam parlemen sebesar 8,82 persen.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). LKK berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa yang terdiri dari LPM, BKM, PKK, RW, RT, Karang Taruna, dan Posyandu.

Tabel 2.6 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan

NO.	TAHUN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)						
		LPM	BKM	PKK	RW	RT	Karang Taruna	Posyandu
1.	2015	32	32	32	-	-	32	-
2.	2016	32	32	32	-	-	32	-
3.	2017	32	32	32	337	1.635	32	-
4.	2018	32	32	32	339	1.646	32	-
5.	2019	27	27	32	340	1.660	32	413
6.	2020	27	27	32	340	1.667	32	413
7.	2021	27	27	32	340	1.680	32	413

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021, diolah

Upaya meningkatkan peran partisipasi LKK melalui 3 (tiga) indikator yaitu persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan, persentase peningkatan keberdayaan masyarakat, dan persentase kinerja kelembagaan masyarakat. Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan persentase kinerja kelembagaan masyarakat telah tercapai 100 %, sedangkan untuk persentase peningkatan keberdayaan masyarakat tercapai 66,67% dan akhir tahun Renstra (tahun 2021) akan tercapai 100%.

Dari uraian diatas pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat dikatakan berhasil atau Baik.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTL	-	2.255.000.000	2.484.648.000	2.744.123.000	2.381.130.000	-	2.142.617.587	2.261.745.076	1.947.503.337	1.891.482.142	-	95,02	91,03	70,97	79,44	2.381.130.000	1.891.482.142
Bij Pegawai	-	2.255.000.000	2.484.648.000	2.744.123.000	2.381.130.000	-	2.142.617.587	2.261.745.076	1.947.503.337	1.891.482.142	-	95,02	91,03	70,97	79,44	2.381.130.000	1.891.482.142
BL	3.373.820.000	4.055.980.000	5.316.484.000	4.211.872.000	2.667.414.000	3.102.446.641	3.567.609.178	4.935.472.810	3.929.947.048	2.575.760.211	91,96	87,96	92,83	93,31	96,56	1.992.650.000	1.955.270.883
<i>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</i>	<i>728.000.000</i>	<i>613.300.000</i>	<i>583.700.000</i>	<i>614.200.000</i>	<i>413.010.000</i>	<i>717.582.492</i>	<i>574.669.338</i>	<i>551.933.958</i>	<i>585.114.849</i>	<i>403.830.053</i>	<i>98,57</i>	<i>93,70</i>	<i>94,56</i>	<i>95,26</i>	<i>97,78</i>	<i>267.410.000</i>	<i>260.313.555</i>
Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.199.940	890.000	1.901.000	1.694.000	1.762.500	100,00	37,08	79,21	70,58	73,44	2.160.000	1.522.512
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.000.000	71.000.000	85.800.000	81.000.000	71.000.000	76.562.564	48.741.627	63.571.703	66.392.121	67.561.905	94,52	68,65	74,09	81,97	95,16	54.800.000	52.249.392
Penyediaan jasa administrasi dan keuangan	26.400.000	29.400.000	35.700.000	51.000.000	39.600.000	26.400.000	29.400.000	35.700.000	47.252.500	38.550.000	100,00	100,00	100,00	92,65	97,35	34.320.000	33.270.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor	29.600.000	38.000.000	60.500.000	77.300.000	97.700.000	29.491.400	36.519.000	58.561.600	75.437.500	97.672.000	99,63	96,10	96,80	97,59	99,97	91.780.000	91.773.720
Penyediaan alat tulis kantor	61.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	16.000.000	60.845.250	24.918.950	24.641.000	24.973.100	15.999.900	99,75	99,68	98,56	99,89	100,00	3.800.000	3.830.850
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.700.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	11.819.400	8.908.100	9.842.800	9.870.000	5.998.000	93,07	89,08	98,43	98,70	99,97	3.460.000	3.634.120
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	2.400.000	2.219.000	1.695.000	2.488.000	1.250.000	100,00	88,76	67,80	99,52	100,00	770.000	770.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	5.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.073.500	1.920.000	1.819.000	2.330.000	2.377.500	85,99	76,80	72,76	93,20	95,10	1.320.000	1.362.800
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	2.125.000	2.220.500	2.377.200	2.374.000	91,30	85,00	88,82	95,09	94,96	2.040.000	1.954.000
Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	30.000.000	31.800.000	30.000.000	24.060.000	36.192.000	19.032.000	26.987.000	24.724.000	23.981.000	90,48	63,44	84,86	82,41	99,67	16.060.000	16.742.600

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	465.500.000	400.000.000	325.000.000	330.000.000	150.000.000	465.498.438	399.995.661	324.994.355	327.576.428	146.303.248	100,00	100,00	100,00	99,27	97,54	56.900.000	53.203.560
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.300.000	143.900.000	203.590.000	322.700.000	297.350.000	223.718.305	110.199.519	166.634.200	275.407.151	273.401.410	70,51	76,58	81,85	85,34	91,95	233.890.000	228.657.749
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	36.600.000	71.690.000	129.000.000	200.000.000	29.661.000	30.190.000	71.210.000	124.915.000	191.149.000	98,87	82,49	99,33	96,83	95,57	194.000.000	185.216.800
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.300.000	55.000.000	61.000.000	80.850.000	65.000.000	59.441.805	40.916.519	36.817.800	56.028.824	53.557.410	84,55	74,39	60,36	69,30	82,40	50.940.000	41.669.049
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	2.500.000	-	1.200.000			2.500.000	-	1.100.500			100,00	-	91,71			(500.000)	(500.000)
Pemeliharaan rutin/berkala komputer		8.500.000	6.400.000				1.579.000	2.271.000				18,58	35,48			-	-
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	204.000.000	37.400.000	60.000.000	100.850.000	21.550.000	123.145.000	34.017.000	53.679.900	88.490.527	20.700.000	60,37	90,95	89,47	87,74	96,06	(19.250.000)	(3.929.000)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	10.500.000	6.400.000	3.300.000	12.000.000	10.800.000	8.970.500	3.497.000	1.555.000	5.972.800	7.995.000	85,43	54,64	47,12	49,77	74,03	8.700.000	6.200.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	28.500.000	33.000.000	33.000.000	20.970.000	33.800.000	26.500.000	30.276.000	30.350.000	18.027.000	96,57	92,98	91,75	91,97	85,97	13.970.000	11.267.000
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10.000.000	8.000.000	8.000.000			10.000.000	7.100.000	6.645.000			100,00	88,75	83,06			(2.000.000)	(2.000.000)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah				8.000.000	7.385.000				6.850.000	7.380.000				85,63	99,93	7.385.000	7.380.000
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD	10.000.000	8.000.000	8.000.000			10.000.000	7.400.000	7.864.000			100,00	92,50	98,30			(2.000.000)	(2.000.000)
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000	5.085.000				6.800.000	5.085.000				85,00	100,00	5.085.000	5.085.000
Penyusunan Profil Perangkat Daerah			12.000.000	12.000.000	-			10.767.000	11.700.000	-				97,50	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000			4.950.000	5.000.000	5.000.000			99,00	100,00	100,00			(1.000.000)	(990.000)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				5.000.000	8.500.000				5.000.000	5.562.000				100,00	65,44	8.500.000	5.562.000
Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000	-	-	-	-	8.850.000	-	-	-	-	88,50	-	-	-	-	(2.000.000)	(1.770.000)
Penyusunan Revisi Renstra		7.500.000	-	-	-		7.000.000	-	-	-	-	93,33	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan masyarakat (PPPM)	56.520.000	61.600.000	72.014.000	37.742.000	9.795.000	56.409.344	59.932.920	71.908.000	37.537.600	9.763.248	99,80	97,29	99,85	99,46	99,68	(1.509.000)	(1.518.621)
Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	43.520.000	48.600.000	52.014.000			43.409.344	46.932.920	52.008.000			99,75	96,57	99,99			(8.704.000)	(8.681.869)
Penyediaan jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah				27.742.000	9.795.000				27.737.600	9.763.248				99,98	99,68	9.795.000	9.763.248
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	13.000.000	13.000.000	20.000.000	10.000.000	-	13.000.000	13.000.000	19.900.000	9.800.000	-	100,00	100,00	99,50	98,00	-	(2.600.000)	(2.600.000)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</i>	32.500.000	32.500.000	100.000.000			19.700.000	31.250.000	100.000.000			60,62	96,15	100,00			(6.500.000)	(3.940.000)
Penguatan kelembagaan forum anak	32.500.000	32.500.000	100.000.000			19.700.000	31.250.000	100.000.000			60,62	96,15	100,00			(6.500.000)	(3.940.000)
<i>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	250.000.000	270.000.000	230.000.000	304.150.000	150.007.000	240.540.000	264.217.000	229.892.000	275.939.000	141.843.000	96,22	97,86	99,95	90,72	94,56	100.007.000	93.735.000
Fasilitasi menuju kota layak anak	250.000.000	270.000.000	230.000.000	204.150.000	100.007.000	240.540.000	264.217.000	229.892.000	189.339.000	92.383.000	96,22	97,86	99,95	92,75	92,38	50.007.000	44.275.000
Penguatan kelembagaan forum anak				100.000.000	50.000.000				86.600.000	49.460.000				86,60	98,92	50.000.000	49.460.000
<i>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</i>	49.000.000	80.200.000	100.000.000			49.000.000	75.150.000	95.455.000			100,00	93,70	95,46			(9.800.000)	(9.800.000)
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	49.000.000	80.200.000	100.000.000			49.000.000	75.150.000	95.455.000			100,00	93,70	95,46			(9.800.000)	(9.800.000)
<i>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</i>	595.000.000	1.081.000.000	1.002.350.000			582.345.000	984.849.301	960.928.152			97,87	91,11	95,87			(119.000.000)	(116.469.000)
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	48.000.000	48.000.000	68.800.000			47.250.000	48.000.000	68.660.000			98,44	100,00	99,80			(9.600.000)	(9.450.000)
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	500.000.000	850.000.000	750.550.000			488.620.000	763.449.301	711.438.152			97,72	89,82	94,79			(100.000.000)	(97.724.000)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	47.000.000	63.000.000	63.000.000			46.475.000	54.600.000	61.980.000			98,88	86,67	98,38			(9.400.000)	(9.295.000)
Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok wanita dan PKK (DBHCHT)		120.000.000	120.000.000				118.800.000	118.850.000				99,00	99,04			-	-
<i>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</i>				<i>799.480.000</i>	<i>381.759.000</i>				<i>759.578.648</i>	<i>348.578.500</i>				95,01	91,31	381.759.000	348.578.500
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan				100.000.000	50.000.000				89.157.000	49.920.000				89,16	99,84	50.000.000	49.920.000
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender				88.000.000	74.159.000				85.129.000	68.559.000				96,74	92,45	74.159.000	68.559.000
Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga				63.000.000					62.492.000					99,19		-	-
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK				518.480.000	242.600.000				492.800.648	215.099.500				95,05	88,66	242.600.000	215.099.500
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja dharma wanita				30.000.000	15.000.000				30.000.000	15.000.000				100,00	100,00	15.000.000	15.000.000
<i>Program model operasional BKB-posyandu padu</i>	<i>40.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>50.000.000</i>			<i>39.000.000</i>	<i>49.750.000</i>	<i>48.550.000</i>			97,50	99,50	97,10			(8.000.000)	(7.800.000)
Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat	40.000.000	50.000.000	50.000.000			39.000.000	49.750.000	48.550.000			97,50	99,50	97,10			(8.000.000)	(7.800.000)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</i>	319.000.000	388.880.000	516.050.000			297.118.000	334.781.700	447.968.200			93,14	86,09	86,81			(63.800.000)	(59.423.600)
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	244.000.000	288.880.000	416.050.000			223.178.000	261.517.500	370.860.200			91,47	90,53	89,14			(48.800.000)	(44.635.600)
Fasilitasi teknologi tepat guna	75.000.000	100.000.000	100.000.000			73.940.000	73.264.200	77.108.000			98,59	73,26	77,11			(15.000.000)	(14.788.000)
<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	<i>851.500.000</i>	<i>1.116.100.000</i>	<i>2.385.780.000</i>	<i>1.379.000.000</i>	<i>1.227.803.000</i>	<i>746.853.500</i>	<i>871.585.400</i>	<i>2.199.017.300</i>	<i>1.304.146.800</i>	<i>1.225.422.000</i>	87,71	78,09	92,17	94,57	99,81	1.057.503.000	1.076.051.300
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	26.500.000	26.500.000	26.500.000			25.320.000	14.525.000	11.175.000			95,55	54,81	42,17			(5.300.000)	(5.064.000)
Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	50.000.000	160.000.000	160.000.000			50.000.000	158.500.000	155.430.000			100,00	99,06	97,14			(10.000.000)	(10.000.000)
Fasilitasi penyelenggaraan lomba pemberdayaan masyarakat	93.500.000	44.600.000	44.600.000			92.252.000	44.350.000	40.773.000			98,67	99,44	91,42			(18.700.000)	(18.450.400)
Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman	410.500.000	484.000.000	211.180.000	250.000.000	68.562.000	315.309.000	435.959.400	145.787.000	232.195.000	66.412.000	76,81	90,07	69,03	92,88	96,86	(13.538.000)	3.350.200
Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan	130.000.000	130.000.000	667.000.000	909.000.000	100.915.000	124.850.000	103.278.000	655.368.700	869.853.800	100.715.000	96,04	79,44	98,26	95,69	99,80	74.915.000	75.745.000
Fasilitasi neighbourhood development	106.000.000	106.000.000	106.000.000			105.800.000	77.406.000	84.379.600			99,81	73,02	79,60			(21.200.000)	(21.160.000)
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	35.000.000	165.000.000	170.500.000			33.322.500	37.567.000	119.168.000			95,21	22,77	69,89			(7.000.000)	(6.664.500)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)			1.000.000.000	220.000.000	1.058.326.000			986.936.000	202.098.000	1.058.295.000			98,69	91,86	100,00	1.058.326.000	1.058.295.000
Program pemberdayaan masyarakat	100.000.000	190.000.000	40.000.000	435.100.000	165.450.000	96.380.000	184.724.000	32.910.000	386.070.000	153.625.000	96,38	97,22	82,28	88,73	92,85	145.450.000	134.349.000
Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok pemuda dan karang taruna (DBHCHT)		40.000.000	40.000.000				39.020.000	32.910.000				97,55	82,28			-	-
Fasilitas kegiatan kepemudaan dan karang taruna	100.000.000	150.000.000				96.380.000	145.704.000				96,38	97,14				(20.000.000)	(19.276.000)
Fasilitasi penyelenggaraan lomba pemberdayaan masyarakat				44.600.000	-				41.350.000	-				92,71	-	-	-
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan				390.500.000	165.450.000				344.720.000	153.625.000				88,28	92,85	165.450.000	153.625.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan				286.500.000	1.270.000				275.803.000	1.270.000				96,27	100,00	1.270.000	1.270.000
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa				26.500.000					22.255.000					83,98			
Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat				160.000.000	1.270.000				157.518.000	1.270.000				98,45	100,00	1.270.000	1.270.000
Fasilitasi teknologi tepat guna				100.000.000	-				96.030.000	-				96,03	-	-	-
TOTAL BTL + BL	3.373.820.000	6.310.980.000	7.801.132.000	6.955.995.000	5.048.544.000	3.102.446.641	5.710.226.765	7.197.217.886	5.877.450.385	4.467.242.353	91,96	90,48	92,26	84,49	88,49	4.373.780.000	3.846.753.025

Dari tabel di atas dapat dilihat jika rasio realisasi dan anggaran untuk mendukung capaian kinerja sudah cukup baik dan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner;
- b. Upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan di Kota Pekalongan;
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan;
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan berkelanjutan;
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- f. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam upaya pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan hak anak;
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;

- h. Upaya kelembagaan perlindungan anak terhadap pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Membangun jejaring dan kerjasama dengan komunitas, lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan global;
- b. Kebijakan pengarusutamaan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
- c. Kebijakan pengarusutamaan hak anak telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- e. Banyaknya potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan, komunitas, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sumbangan pendapatan perempuan	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	Kurangnya dukungan dan peran serta perangkat daerah terkait dalam penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender
	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan bidang ekonomi	Penghargaan terhadap pendapatan atau pekerjaan perempuan terutama di sektor informal belum diakui sama dengan laki-laki
	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan	Masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat
		Tingkat pendidikan dan ekonomi masih rendah
Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak	Belum optimalnya Dekela	Perangkat daerah dan stekholder terkait kurang memahami implementasi pengarusutamaan hak anak
		Belum tersedianya dokumen RAD KLA
	Masih adanya kekerasan terhadap anak	Masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat
		Tingkat pendidikan dan ekonomi rendah
		Rendahnya ketrampilan pengasuhan orang tua terhadap anak
Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	Belum optimalnya kemandirian TNI dan masyarakat
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria cepat berkembang	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perkembangan kelurahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya dokumen laporan evaluasi perkembangan kelurahan
	LKK belum difungsikan secara optimal	Rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan
		Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat perkotaan terhadap lingkungan
	Belum optimalnya dokumen perencanaan, sistem pengendalian internal pemerintah	Belum tersedianya data yang valid dan update untuk dasar penyusunan dokumen perencanaan dan sistem pengendalian internal pemerintah
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas dan fungsi;
 - b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak;
 - c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan;
 - d. Pelayanan informasi publik belum optimal.
2. Permasalahan terkait pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat :
 - a. Rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - b. Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat perkotaan terhadap lingkungan;
 - c. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang;
 - d. Potensi nilai adat istiadat masyarakat belum diberdayakan secara optimal.

3. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
 - a. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Indeks Pemberdayaan Gender masih rendah;
 - b. Perangkat daerah dan stekholder terkait kurang memahami implementasi pengarusutamaan hak anak;
 - c. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal;
 - e. Dukungan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa. Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Industri Batik sebagai produk unggulan “branch image” harus mampu daya saing dengan daerah lain dan permasalahan lingkungan hidup terkait sumber daya air dan permasalahan pembuangan limbah.

Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan

masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan Onshore. Pembangunan pelabuhan on shore ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal penting, yaitu upaya mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan, serta sinkronisasi dengan upaya pengendalian banjir dan rob.

Lebih Sejahtera, Kota Pekalongan adalah kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Lebih Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan.

Lebih Religius, dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan **misi** yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan;

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman;
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

- b. Misi ke-2 : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan”;
- c. Misi ke-7 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government”.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang mendukung tugas dan fungsi tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

No	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”</p> <p>Misi ke-2 : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan”</p> <p>Misi ke-7 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran organisasi perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. • Belum optimalnya dukungan dan peran serta organisasi/lembaga masyarakat, komunitas, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan PUHA • Terbatasnya personil perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas antar perangkat daerah • Jejaring dan kerjasama dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan, komunitas, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi • Dukungan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan belum difungsikan secara optimal 		
3	<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalnya pengarusutamaan gender - Optimalnya pengarusutamaan hak anak - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 			

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian PP dan PA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase kabupaten/ kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran

strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Indeks Kualitas Keluarga.
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Termasuk TPPO

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- c. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
 - d. prevalensi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simponi); dan
 - e. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
- Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
 - b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
 - c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
 - d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
- Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian PP dan PA dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender			
	c. Meningkatnya capaian TPAK Perempuan			
	d. Meningkatnya capaian Indeks PUG Nasional			
2.	a. Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Rendahnya pendidikan/SDM, kemiskinan mneyebabkan perempuan rentan menikah usia < 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi Kota Layak Anak belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUHA dan Perencanaan dan penganggaran responsif anak 	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
	b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;			
	c. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan Peringkat KLA			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terhadap anak		
	d. Berkurangnya persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Lembaga pengasuhan belum 100% terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi lembaga pengasuhan alternatif belum optimal. 	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
3.	a. Meningkatnya indeks partisipasi masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	b. Meningkatnya indeks kualitas keluarga			
4.	a. Menurunnya prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. b. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga LP-PAR/ P2TP2A
	b. Meningkatnya prevalensi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	a. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. b. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
	c. Meningkatnya persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan	a. Kasus kekerasan terhadap perempuan memerlukan pendampingan dalam waktu yang cukup lama b. Kentalnya budaya patriarki menyebabkan perempuan rentan menjadi korban	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga LP-PAR/

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan TPPO yang sesuai standar (%).		personel pengolah data	P2TP2A
5.	a. Menurunnya prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	a. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak b. Pengasuhan yang kurang efektif menjadikan anak sangat rentan terhadap kekerasan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan personel pengolah data	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga LP-PAR/P2TP2A
	c. Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
	d. Menurunnya persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 		
	e. Meningkatnya persentase pemerintah daerah yang meaksanakan layanan sesuai standar;	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus kekerasan terhadap anak memerlukan pendampingan dalam waktu yang cukup lama • Kekurangcakapan orang tua dalam pengasuhan 	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
6.	a. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi			
	b. Opini BPK atas Laporan Keuangan			
	c. Tingkat Maturitas SPIP			
	d. Meningkatnya Nilai SAKIP			

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 :

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya;

Sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024:

1. Berkembangnya status pembangunan desa
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
6. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi
7. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal

10. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
11. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
12. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi
13. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Berkembangnya status pembangunan desa
- Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan
- Menurunnya kemiskinan di perdesaan

2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi

3. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
 Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kapasitas SDM
 desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan, tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkembangnya status pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan belum difungsikan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat perkotaan terhadap lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergitas antar perangkat daerah Dukungan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2.	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan			
3.	Menurunnya kemiskinan di perdesaan			
4.	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi			

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak. Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan;
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah. Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	a. Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk 	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga LP-PAR/ P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
2.	a. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana			
	b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			
3.	a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
	b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah **“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI

2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) dalam perwujudan peningkatan kemandirian Desa dan pelayanan yang berkualitas sebagai wujud percepatan reformasi birokrasi yang dinamis. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2018 - 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah;
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah

Sasaran :

1. Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah;
2. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan, sebagai berikut :

1. Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah;
 - Pembinaan Produk Hukum Daerah dan penyusunan Data Base Bidang Pemerintahan Desa di Jawa Tengah;
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah;
 - Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa Di Jawa Tengah;

- Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan.
2. Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah;
 - Pengembangan Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah.
 3. Program Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah;
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah;
 - Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Jawa Tengah.

.Apabila dirumuskan, hasil telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan, tercantum pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kelembagaan Kelurahan Belum difungsikan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil di Perangkat Daerah • Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat perkotaan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas Perangkat Daerah • Adanya beberapa organisasi/lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			lingkungan	pemberdayaan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengarusutaaan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak;
3. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Belum optimalnya kinerja organisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**”. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 maka ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tersebut disusun sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender		1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.78	59.14	59.59	60.28	61.00
		1. Meningkatkan Sumbangan Pendapatan Perempuan	1. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	28.51	28.51	28.52	28.52	28.53
2.	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak		1. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
		1. Meningkatkan Skor Kota Layak anak	1. Skor Kota Layak Anak	628.00	630.00	632.00	634.00	636.00
3.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	83.63	83.88	84.13	84.38	84.63

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		1. Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	1. Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	8.08	8.55	9.02	9.49	10.00
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP OPD	82.00	83.50	85.00	86.50	88.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender Inisiasi pemilihan Gender Champion
		Fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi melalui organisasi/lembaga kemasyarakatan	Peningkatan pemahaman perempuan melalui advokasi PUG
		Penyediaan layanan perlindungan perempuan	Peningkatan layanan pengaduan perlindungan perempuan

Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan advokasi, pendampingan dan konsultasi keluarga
Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Meningkatnya Skor Kota Layak anak	Sinergitas antar perangkat daerah	Mewujudkan sekolah yang ramah anak
			Peningkatan partisipasi anak dalam kelembagaan forum anak
			Melaksanakan advokasi kelurahan layak anak
		Jejaring dan kerjasama dengan komunitas, organisasi/lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi	Pembentukan APSAI
			Melaksanakan koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI
		Penyediaan dokumen rencana aksi daerah kota layak anak	Penyusunan dokumen RAD KLA
Penyediaan layanan perlindungan anak	Peningkatan layanan pengaduan perlindungan anak		
	Melakukan advokasi, pendampingan dan konsultasi keluarga		
	Melaksanakan pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan		
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Peningkatan fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan	Fasilitasi TMMD
			Fasilitasi karya bhakti TNI

Visi	: Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi 2	: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Peningkatan kinerja administrasi kelurahan	Monitoring dan evaluasi perkembangan kelurahan kelurahan secara berkala
			Penyusunan dokumen evaluasi perkembangan kelurahan
		Peningkatan partisipasi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Penataan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
			Monitoring dan evaluasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan secara berkala
			Pelatihan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
			Pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja fasilitator pemberdayaan masyarakat
			Penjaringan Kader Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi TTG
			Fasilitasi BBGRM
			Fasilitasi kegiatan TP PKK Kota Pekalongan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, sistem pengendalian internal pemerintah dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan sistem pengendalian internal pemerintah yang berkualitas	
		Monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) yang terbagi dalam satu atau beberapa sub kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Renstra Tahun 2021-2026 telah menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha), dengan kegiatan :
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Perlindungan Khusus Anak,
dengan kegiatan :
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Program Peningkatan Kerjasama Desa,
dengan kegiatan :
 - Fasilitasi Kerja sama antar Desa.
 6. Program Administrasi Pemerintahan Desa,
dengan kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat,
dengan kegiatan :
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun 2021-2026, sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Rencana Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disajikan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif DPMPPA Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target Kinerja	Target-Rp				Target Kinerja								
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								5,658,535,000		8,149,437,000		5,954,156,000		5,832,478,000		5,816,381,000		31,410,987,000		
1	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender			Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.29	58.78		59.14		59.59		60.28		61.00		61.00		DPMPPA	Kota Pekalongan
	1 Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan			Indeks	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28.50	28.51		28.51		28.52		28.52		28.53		28.53			
		02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	-	3.70	104,698,000	5.55	60,354,000	7.39	96,534,000	9.24	77,844,000	11.09	97,798,000	11.09	437,228,000	Bidang PP, PHA dan PPA	
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persentase Sub Kegiatan perangkat daerah yang responsif gender	-	16.67	47,114,000	16.67	9,285,000	16.67	46,564,000	16.67	28,576,000	16.67	47,785,000	16.67	179,324,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target Kinerja	Target-Rp
							Target Kinerja	Target-Rp													
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				47,114,000		9,285,000		46,564,000		28,576,000		47,785,000		179,324,000				
				Kali	Jumlah Event Gender Champions yang dilaksanakan	-	1.00	20,000,000	-	-	1.00	20,000,000	1.00	19,126,000	1.00	19,835,000	4.00	78,961,000			
				Dokumen	Jumlah dokumen PPRG yang disusun	-	1.00	10,000,000	1.00	9,285,000	1.00	9,450,000	1.00	9,450,000	1.00	9,450,000	5.00	47,635,000			
				Kali	Jumlah kegiatan Bintek penyusunan dokumen yang responsif gender yang dilaksanakan	-	1.00	17,114,000	-	-	1.00	17,114,000	-	-	1.00	18,500,000	3.00	52,728,000			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi	6.67	13.33	41,879,000	20.00	37,141,000	26.67	36,342,000	33.33	35,831,000	40.00	36,373,000	40.00	187,566,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp											
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pemberdayaan Perempuan																
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					41,879,000		37,141,000		36,342,000		35,831,000		36,373,000		187,566,000			
				Kali	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan	1.00	1.00	41,879,000	1.00	37,141,000	1.00	36,342,000	1.00	35,831,000	1.00	36,373,000	5.00	187,566,000			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharmawanita	50.00	100.00	15,705,000	100.00	13,928,000	100.00	13,628,000	100.00	13,437,000	100.00	13,640,000	100.00	70,338,000			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan					15,705,000		13,928,000		13,628,000		13,437,000		13,640,000		70,338,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target Kinerja	Target-Rp
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Kabupaten/Kota																		
				Kali	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	20.00	20.00	15,705,000	20.00	13,928,000	20.00	13,628,000	20.00	13,437,000	20.00	13,640,000	100.00	70,338,000			
		02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persen	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23.99	23.99	281,896,000	23.99	65,837,000	23.99	64,421,000	23.99	63,515,000	23.99	64,476,000	23.99	540,145,000	Bidang PP, PHA dan PPA		
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100.00	100.00	281,896,000	100.00	65,837,000	100.00	64,421,000	100.00	63,515,000	100.00	64,476,000	100.00	540,145,000			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan					281,896,000		65,837,000		64,421,000		63,515,000		64,476,000		540,145,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp											
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kewenangan Kabupaten/Kota																		
				Kali	Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan	27.00	12.00	64,780,000	12.00	55,250,000	12.00	55,000,000	12.00	54,515,000	12.00	55,155,000	60.00	284,700,000			
				Kali	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga	3.00	9.00	45,610,000	9.00	10,587,000	9.00	9,421,000	9.00	9,000,000	9.00	9,321,000	45.00	83,939,000			
				Kali	Jumlah kegiatan Case conference kasus perempuan yang dilaksanakan		48.00	34,944,000	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	34,944,000			
				Kali	Jumlah kegiatan FGD manajemen kasus yang dilaksanakan		1.00	18,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	18,500,000			
				Kali	Jumlah kegiatan Advokasi		4.00	62,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	62,562,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					PPKBM yang dilaksanakan																
				Kali	Jumlah kegiatan FGD peran Media Massa dalam Pencegahan Kekerasan yang dilaksanakan		3.00	55,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	55,500,000			
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak			Kategori	Kategori Kota Layak Anak	Madya	Madya		Madya		Madya		Madya		Madya		Madya				
	1 Meningkatnya Skor Kota Layak Anak			Skor	Skor Kota Layak Anak	626.00	628.00		630.00		632.00		634.00		636.00		636.00				
		02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persen	Persentase Dekelara (desa/kelurahan layak anak)	25.93	29.63	322,429,000	33.33	266,001,000	40.74	242,700,000	48.15	265,032,000	55.56	251,415,000	55.56	1,347,577,000			Bidang PP,PHA dan PPA
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	9.98	10.18	178,890,000	10.37	112,226,000	10.57	111,630,000	10.76	110,060,000	10.96	113,543,000	10.96	626,349,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp				Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				178,890,000		112,226,000		111,630,000		110,060,000		113,543,000		626,349,000				
				Sekolah	Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat	12.00	12.00 23,865,000	12.00	20,865,000	12.00	20,865,000	12.00	20,500,000	12.00	21,000,000	60.00	107,095,000				
				Kelurahan	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan	-	27.00 92,275,000	27.00	81,361,000	27.00	81,265,000	27.00	80,560,000	27.00	82,543,000	27.00	418,004,000				
				Lembaga	Jumlah Lembaga APSAI yang dibentuk	-	1.00 12,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	12,750,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Kali	Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan	-	-	-	3.00	10,000,000	3.00	9,500,000	3.00	9,000,000	3.00	10,000,000	12.00	38,500,000		
				Dokumen	Jumlah dokumen RAD Kota Layak Anak yang disusun	-	1.00	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	50,000,000		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persentase forum anak yang aktif	3.13	9.38	143,539,000	15.63	153,775,000	28.13	131,070,000	34.38	154,972,000	40.63	137,872,000	40.63	721,228,000		
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					45,000,000		39,275,000		38,000,000		39,500,000		40,000,000		201,775,000		
				Kali	Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan	1.00	1.00	20,000,000	1.00	19,275,000	1.00	18,500,000	1.00	20,000,000	1.00	20,500,000	5.00	98,275,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp										
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Kelompok	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	4.00	4.00	25,000,000	4.00	20,000,000	4.00	19,500,000	4.00	19,500,000	4.00	19,500,000	20.00	103,500,000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				57,339,000		54,000,000		52,900,000		54,000,000		55,000,000		273,239,000			
				Kali	Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan	1.00	1.00	36,500,000	1.00	35,500,000	1.00	34,400,000	1.00	35,500,000	1.00	36,500,000	5.00	178,400,000		
				Kali	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan	-	1.00	20,839,000	1.00	18,500,000	1.00	18,500,000	1.00	18,500,000	1.00	18,500,000	5.00	94,839,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					41,200,000		60,500,000		40,170,000		61,472,000		42,872,000		246,214,000		
				Kelompok	Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB	4.00	-	-	4.00	20,000,000	-	-	4.00	19,500,000	-	-	8.00	39,500,000		
				Kali	Jumlah kegiatan pelatihan kader Ketahanan Keluarga dan kader PATBM tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	1.00	1.00	41,200,000	1.00	40,500,000	1.00	40,170,000	1.00	41,972,000	1.00	42,872,000	5.00	206,714,000		
		02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persen	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100.00	100.00	293,146,000	100.00	50,228,000	100.00	49,148,000	100.00	48,457,000	100.00	49,645,000	100.00	490,624,000	Bidang PP, PHA dan PPA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100.00	100.00	293,146,000	100.00	50,228,000	100.00	49,148,000	100.00	48,457,000	100.00	49,645,000	100.00	490,624,000		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					293,146,000		50,228,000		49,148,000		48,457,000		49,645,000		490,624,000		
				Kali	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	19.00	13.00	83,860,000	13.00	35,178,000	13.00	35,148,000	13.00	34,457,000	13.00	35,645,000	65.00	224,288,000		
				Kali	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga	5.00	6.00	32,750,000	6.00	8,550,000	6.00	7,500,000	6.00	7,500,000	6.00	7,500,000	30.00	63,800,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Kali	Jumlah pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan yang dilaksanakan	-	4.00	24,742,000	4.00	6,500,000	4.00	6,500,000	4.00	6,500,000	4.00	6,500,000	20.00	50,742,000		
				Kali	Jumlah kegiatan Case conference kasus anak yang dilaksanakan	-	48.00	34,944,000									48.00	34,944,000		
				Kali	Jumlah kegiatan Bintek Program Roots yang dilaksanakan	-	1.00	42,850,000									1.00	42,850,000		
				Kali	Jumlah FGD Peran Forum Anak dalam 2P yang dilaksanakan	-	1.00	18,500,000									1.00	18,500,000		
				Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan sosialisasi pengasuhan anak	-	11.00	55,500,000									11.00	55,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target Kinerja	Target-Rp												
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik			Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.19	83.63		83.88		84.13		84.38		84.63		84.63			
	1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat			Persen	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	7.14	8.08		8.55		9.02		9.49		10.00		10.00			
		02.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persen	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan Kelurahan	16.67	33.33	1,065,014,000	50.00	1,250,618,000	66.67	1,240,453,000	83.33	1,233,952,000	100.00	1,240,847,000	100.00	6,030,884,000	Bidang KMPM	
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persen	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	11.11	11.11	1,065,014,000	11.11	1,250,618,000	11.11	1,240,453,000	11.11	1,233,952,000	11.11	1,240,847,000	66.67	6,030,884,000		
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					1,065,014,000		1,250,618,000		1,240,453,000		1,233,952,000		1,240,847,000		6,030,884,000		
				Kelurahan	Jumlah kelurahan yang	3.00	3.00	965,014,000	3.00	1,150,618,000	3.00	1,140,453,000	3.00	1,133,952,000	3.00	1,140,847,000	15.00	5,530,884,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp											
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					terfasilitasi kegiatan TMMD																
				Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan Karya Bakti TNI	1.00	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	5.00	500,000,000			
		02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	51.85	55.56	58,630,000	59.26	51,997,000	62.96	50,878,000	66.67	50,164,000	70.37	50,922,000	70.37	262,591,000	Bidang KMPM		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100.00	100.00	58,630,000	100.00	51,997,000	100.00	50,878,000	100.00	50,164,000	100.00	50,922,000	100.00	262,591,000			
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					58,630,000		51,997,000		50,878,000		50,164,000		50,922,000		262,591,000			
				Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	3.00	3.00	42,500,000	3.00	40,147,000	3.00	40,378,000	3.00	40,364,000	3.00	41,122,000	15.00	204,511,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun	1.00	1.00	16,130,000	1.00	11,850,000	1.00	10,500,000	1.00	9,800,000	1.00	9,800,000	5.00	58,080,000		
		02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	95.97	96.16	803,854,000	96.35	811,775,000	96.54	931,001,000	96.73	787,540,000	96.92	648,324,000	96.92	3,982,494,000	Bidang KMPM	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100.00	100.00	803,854,000	100.00	811,775,000	100.00	931,001,000	100.00	787,540,000	100.00	648,324,000	100.00	3,982,494,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target Kinerja	Target-Rp				Target Kinerja	Target-Rp								
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					215,762,000		223,250,000		266,415,000		199,015,000		165,475,000		1,069,917,000			
				Dokumen	Jumlah laporan pengolahan data aplikasi jogotonggo yang disusun	3.00	4.00	70,000,000	4.00	70,000,000	4.00	100,000,000	4.00	64,015,000	4.00	20,000,000	4.00	324,015,000			
				Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun	-	2.00	145,762,000	2.00	153,250,000	2.00	166,415,000	2.00	135,000,000	2.00	125,975,000	2.00	726,402,000			
				LKK	Jumlah kelembagaan LPM dan BKM yang	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00	19,500,000	54.00	19,500,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp				Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					dilakukan reorganisasi																
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				172,442,000		172,875,000		248,936,000		172,875,000		158,375,000		925,503,000				
				Kali	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan	1.00	1.00 14,442,000	1.00	14,875,000	1.00	35,000,000	1.00	14,875,000	1.00	14,875,000	5.00	94,067,000				
				Kali	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang	5.00	3.00 136,000,000	3.00	136,000,000	3.00	188,436,000	3.00	136,000,000	3.00	125,000,000	15.00	721,436,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target Kinerja	Target-Rp
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp											
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					dilaksanakan																
				Kali	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	0.00	1.00	22,000,000	1.00	22,000,000	1.00	25,500,000	1.00	22,000,000	1.00	18,500,000	5.00	110,000,000			
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					102,000,000		102,000,000		102,000,000		102,000,000		86,200,000		494,200,000			
				Inovator	Jumlah inovator TTG	3.00	3.00	34,616,000	3.00	34,616,000	3.00	34,616,000	3.00	34,616,000	3.00	31,000,000	15.00	169,464,000			
				Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand gelar karya TTG	3.00	3.00	67,384,000	3.00	67,384,000	3.00	67,384,000	3.00	67,384,000	3.00	55,200,000	15.00	324,736,000			
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					71,000,000		71,000,000		71,000,000		71,000,000		68,000,000		352,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	3.00	3.00	71,000,000	3.00	71,000,000	3.00	71,000,000	3.00	71,000,000	3.00	68,000,000	15.00	352,000,000		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				242,650,000		242,650,000		242,650,000		242,650,000		170,274,000		1,140,874,000			
				Kelurahan	Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina	8.00	8.00	3,200,000	8.00	3,200,000	8.00	10,300,000	8.00	10,300,000	8.00	2,500,000	40.00	29,500,000		
				Bulan	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan TP PKK Kota Pekalongan	12.00	12.00	184,476,000	12.00	175,676,000	12.00	184,476,000	12.00	175,676,000	12.00	121,500,000	60.00	841,804,000		
				Kali	Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari	1.00	1.00	5,750,000	1.00	5,750,000	1.00	5,750,000	1.00	5,750,000	50.00	4,500,000	5.00	27,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp											
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					limbah plastik yang dilaksanakan																
				Kali	Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan	1.00	-	-	1.00	3,750,000	-	-	1.00	3,750,000	-	-		7,500,000			
				Kelompok	Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah	-	4.00	8,500,000	4.00	8,500,000	4.00	8,500,000	4.00	8,500,000	4.00	7,100,000	20.00	41,100,000			
				TP PKK Kelurahan	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK	3.00	3.00	8,050,000	3.00	8,050,000	3.00	8,050,000	3.00	8,050,000	3.00	8,050,000	15.00	40,250,000			
				TP PKK Kelurahan	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK	3.00	3.00	5,050,000	3.00	5,050,000	3.00	5,050,000	3.00	5,050,000	3.00	5,050,000	15.00	25,250,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				TP PKK Kelurahan	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba produk unggulan One Village One Product Innovation	3.00	-	-	3.00	5,050,000	-	-	3.00	5,050,000	-	-	6.00	10,100,000		
				TP PKK Kelurahan	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh	3.00	3.00	7,100,000	3.00	7,100,000	3.00	7,100,000	3.00	7,100,000	3.00	7,100,000	15.00	35,500,000		
				TP PKK Kelurahan	Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK	3.00	3.00	5,324,000	3.00	5,324,000	3.00	5,324,000	3.00	5,324,000	3.00	5,324,000	15.00	26,620,000		
				Kali	Jumlah Peserta Pelatihan	-	2.00	7,100,000	2.00	7,100,000	-	-	-	-	2.00	4,650,000	6.00	18,850,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					TP3 PKK																
				Kali	Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan	-	1.00	8,100,00	1.00	8,100,00	1.00	8,100,00	1.00	8,100,00	1.00	4,500,00	5.00	36,900,000			
	2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks	Nilai SAKIP OPD	78.63	82.00		83.50		85.00		86.50		88.00		88.00				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2,728,868,000		5,592,627,000		3,279,021,000		3,305,974,000		3,412,954,000		18,319,444,000		Sekretariat	
				Persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100.00	100.00	2,136,431,000	100.00	2,704,282,000	100.00	2,719,365,000	100.00	2,749,349,000	100.00	2,843,093,000	100.00	13,152,520,000			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00	100.00	18,322,000	100.00	19,035,000	100.00	18,625,000	100.00	23,872,000	100.00	19,686,000	100.00	99,540,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
				Dokumen	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2.00	2.00	3,322,000	2.00	4,035,000	2.00	3,625,000	2.00	3,522,000	2.00	4,186,000	10.00	18,690,000		
				Dokumen	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	6,500,000	-	-	1.00	6,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
				Dokumen	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2.00	2.00	1,500,000	2.00	1,500,000	2.00	1,500,000	2.00	1,500,000	2.00	1,500,000	10.00	7,500,000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
				Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi renja	4.00	4.00	2,000,000	4.00	2,000,000	4.00	2,000,000	4.00	1,500,000	4.00	2,250,000	20.00	9,750,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					yang disusun															
				Dokumen	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2.00	2.00	1,550,000	2.00	1,550,000	2.00	1,550,000	2.00	1,500,000	2.00	1,750,000	10.00	7,900,000		
				Bulan	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12.00	12.00	5,000,000	12.00	5,000,000	12.00	5,000,000	12.00	4,400,000	12.00	5,000,000	60.00	24,400,000		
				Dokumen	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5.00	5.00	4,950,000	5.00	4,950,000	5.00	4,950,000	5.00	4,950,000	5.00	5,000,000	25.00	24,800,000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100.00	100.00	2,118,109,000	100.00	2,685,247,000	100.00	2,700,740,000	100.00	2,725,477,000	100.00	2,823,407,000	100.00	13,052,980,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,069,959,000		2,637,097,000		2,652,590,000		2,677,327,000		2,775,257,000		12,812,230,000			
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12.00	12.00	2,069,959,000	12.00	2,637,097,000	12.00	2,652,590,000	12.00	2,677,327,000	12.00	2,775,257,000	60.00	12,812,230,000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				46,500,000		46,500,000		46,500,000		46,500,000		46,500,000		232,500,000			
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12.00	12.00	46,500,000	12.00	46,500,000	12.00	46,500,000	12.00	46,500,000	12.00	46,500,000	60.00	232,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,650,000		8,250,000			
				Bulan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1.00	1.00	1,650,000	1.00	1,650,000	1.00	1,650,000	1.00	1,650,000	1.00	1,650,000	5.00	8,250,000		
				Persen	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	100.00	100.00	392,937,000	100.00	385,231,000	100.00	381,762,000	100.00	381,231,000	100.00	391,815,000	100.00	1,932,976,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target Kinerja	Target-Rp				Target Kinerja	Target-Rp								
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00	100.00	9,946,000	100.00	8,821,000	100.00	8,631,000	100.00	8,510,000	100.00	8,639,000	100.00	44,547,000			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					9,946,000		8,821,000		8,631,000		8,510,000		8,639,000		44,547,000			
				Kali	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	-	2.00	9,946,000	2.00	8,821,000	2.00	8,631,000	2.00	8,510,000	2.00	8,639,000	10.00	44,547,000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100.00	100.00	230,134,000	100.00	202,405,000	100.00	198,052,000	100.00	195,266,000	100.00	198,220,000	100.00	1,024,077,000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1,250,000		1,250,000		1,000,000		750,000		750,000		5,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			Target Kinerja	Target-Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.00	12.00	1,250,000	12.00	1,250,000	12.00	1,000,000	12.00	750,000	12.00	750,000	60.00	5,000,000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43,824,000		27,345,000		25,052,000		23,766,000		26,720,000		146,707,000			
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12.00	12.00	16,721,000	12.00	16,721,000	12.00	14,500,000	12.00	13,500,000	12.00	16,454,000	60.00	77,896,000		
				Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4.00	18.00	27,103,000	10.00	10,624,000	20.00	10,552,000	8.00	10,266,000	8.00	10,266,000	64.00	68,811,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2,500,000		1,250,000		1,000,000		750,000		750,000		6,250,000			
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12.00	12.00	2,500,000	12.00	1,250,000	12.00	1,000,000	12.00	750,000	12.00	750,000	60.00	6,250,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24,060,000		24,060,000		22,500,000		22,500,000		22,500,000		115,620,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11.00	11.00	24,060,000	11.00	24,060,000	11.00	22,500,000	11.00	22,500,000	11.00	22,500,000	55.00	115,620,000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	28,000,000									
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.00	12.00	6,000,000	12.00	6,000,000	12.00	6,000,000	12.00	5,000,000	12.00	5,000,000	60.00	28,000,000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	12,500,000									
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12.00	12.00	2,500,000	12.00	2,500,000	12.00	2,500,000	12.00	2,500,000	12.00	2,500,000	60.00	12,500,000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	710,000,000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Kinerja	Target-Rp		
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp										
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Orang/Kali	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	157.00	157.00	150,000,000	157.00	140,000,000	157.00	140,000,000	157.00	140,000,000	157.00	140,000,000	785.00	710,000,000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	100.00	152,857,000	100.00	174,005,000	100.00	175,079,000	100.00	177,455,000	100.00	184,956,000	100.00	864,352,000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		12,000,000		
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12.00	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	12.00	2,400,000	60.00	12,000,000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					63,000,000		67,905,000		68,979,000		71,355,000		78,856,000		350,095,000		
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.00	12.00	63,000,000	12.00	67,905,000	12.00	68,979,000	12.00	71,355,000	12.00	78,856,000	12.00	350,095,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					87,457,000		103,700,000		103,700,000		103,700,000		103,700,000		502,257,000		
				Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12.00	12.00	87,457,000	12.00	103,700,000	12.00	103,700,000	12.00	103,700,000	12.00	103,700,000	60.00	502,257,000		
				Persen	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100.00	100.00	199,500,000	100.00	2,503,14,000	100.00	177,894,000	100.00	175,394,000	100.00	178,046,000	100.00	3,233,948,000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	100.00	-	-	2,321,309,000	-	-	-	-	-	-	-	2,321,309,000		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		2,321,309,000		-		-		-		2,321,309,000		
				Unit	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	1.00	2,321,309,000	-	-	-	-	-	-	-	2,321,309,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	100.00	199,500,000	100.00	181,805,000	100.00	177,894,000	100.00	175,394,000	100.00	178,046,000	100.00	912,639,000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000		325,000,000		
				Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	18.00	18.00	65,000,000	18.00	65,000,000	18.00	65,000,000	18.00	65,000,000	18.00	65,000,000	18.00	325,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					123,700,000		106,005,000		102,094,000		99,594,000		102,246,000		533,639,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2.00	2.00	123,700,000	2.00	106,005,000	2.00	102,094,000	2.00	99,594,000	2.00	102,246,000	2.00	533,639,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		54,000,000		
				Bulan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12.00	12.00	10,800,000	12.00	10,800,000	12.00	10,800,000	12.00	10,800,000	12.00	10,800,000	60.00	54,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	28,50	28,50	28,51	28,51	28,52	28,52	28,53	28,53
2	Skor Kota Layak Anak	626,00	626,00	628,00	630,00	632,00	634,00	636,00	636,00
3	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	7,14	7,61	8,08	8,55	9,02	9,49	10,00	10,00
4	Nilai SAKIP OPD	78,63	80,50	82,00	83,50	85,00	86,50	88,00	88,00

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun guna menyesuaikan terhadap RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekalongan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pekalongan, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

